

MEA Dan Kebijakan Persaingan Usaha

Oleh Mustapa Kamal Rokan

Single market dalam MEA berdampak terhadap pengertian "pasar bersangkutan", pengertian "kartel" serta dapat mengubah komposisi penguasaan pasar di negara lain dalam hal akuisisi dan merger

The ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bermakna penting sekaligus strategis bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Disebut penting, sebab MEA akan mengintegrasikan seluruh negara ASEAN ke dalam satu pasar (single market). Karena itu semua negara berkepentingan terhadap MEA sehingga semua negara sedang bersiap bagi kepentingan nasionalnya. Negara yang tidak siap dan tidak mempunyai daya saing yang kuat akan tergilas produk negara lain.

Selain penting, pasar ASEAN dalam satu kesatuan (satu pasar) berposisi strategis bagi kawasan ASEAN. ASEAN yang memiliki penduduk sekitar 612 juta jiwa lebih menjadi kawasan yang diminati di dunia, sebab kawasan ini telah menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini. Dalam konteks ini, ASEAN menjadi berkepentingan untuk berkiprah dalam tataran kawasan dunia. Kesatuan pasar ASEAN akan menjadikan ASEAN berposisi sebagai kawasan strategis di dunia. Persoalannya, negara mana yang siap memanfaatkan arus investasi yang besar tersebut bagi kepentingan ekonomi nasionalnya. Bagi Indonesia, pertanyaan besarnya adalah mampukah memanfaatkan arus investasi yang besar tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha dalam negeri dan kedaulatan ekonomi bangsa?

Sebaliknya, MEA dengan single market yang bernilai penting dan strategis di atas dapat menjadi kontra-produktif jika terjadinya penyalahgunaan posisi dominan atau berkembangnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak. Persaingan yang tidak sehat sangat mungkin terjadi di era pasar bebas seperti MEA ini, sebab setiap pelaku usaha bebas melakukan ekspansi usaha untuk meraup keuntungan bisnis. Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar diantara negara ASEAN persaingan yang tidak sehat sangat rentan terjadi.

Tulisan ini akan mengulas kondisi objektif kesiapan hukum persaingan usaha dalam menghadapi keberlakuan MEA. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas isu hukum persaingan usaha Indonesia terhadap keberlakuan MEA serta kebijakan persaingan usaha bagaimana yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi MEA.

Kondisi Objektif

Beberapa kondisi objektif yang terjadi menjelang keberlakuan MEA terkait dengan

isu persaingan adalah. Pertama, belum semua negara ASEAN memiliki hukum persaingan usaha. Dari 10 negara ASEAN, baru lima negara yang mempunyai hukum persaingan usaha. Kedua, setiap negara dapat dipastikan memiliki sifat nasionalisme dan protectionism sebab setiap negara mempunyai keanekaragaman tersendiri, mempunyai ego sektoral masing-masing dalam melaksanakan hukum ekonomi termasuk kebijakan dan hukum persaingan usaha. Karena itu dibutuhkan legal framework untuk cross border cooperation, dan mendorong competition policy untuk diterapkan.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2007, ASEAN telah menyepakati ASEAN Economic Blueprint sebagai landasan untuk mewujudkan ASEAN Economic Community yang salah satu karakteristik kuncinya adalah tercapainya Competitive Economic Region melalui implementasi kebijakan dan hukum persaingan usaha. Selain itu, dalam menghadapi MEA, ASEAN melalui Sekretariat ASEAN telah melakukan sejumlah aksi seperti ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) sebagai lembaga struktural di ASEAN yang menangani implementasi hukum persaingan telah menginisiasi dan mempromosikan hal ini. Indonesia telah melakukan peran yang strategis seperti menjadi ketua dalam penyusunan Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN (2013) dan berkontribusi aktif dalam penyusunan ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (2010) dan Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business (2011).

MEA & Hukum Persaingan Usaha

Cassey LEE dan Yoshifumi Fukunaga dalam ASEAN Regional Cooperation on Competition Policy (2013) menyebutkan bahwa karakteristik utama MEA adalah a highly competitive economic region. Mengingat dalam teori ekonomi bahwa persaingan berdampak positif terhadap ekonomi. Penelitian Dutz dan Hayri (1999) menyebutkan bahwa implikasi persaingan adalah pertumbuhan (growth) yang merupakan dasar dari perdagangan bebas (trade liberalization), kualitas institusi dan berdampak terhadap kebijakan lingkungan. Selain itu, persaingan berdampak terhadap iklim investasi yang menarik bagi setiap pelaku usaha yang akan melakukan serangkaian kegiatan bisnis.

Karena itu hukum persaingan usaha sebagai salah satu kebijakan persaingan usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi MEA. Penulis melihat bahwa

terdapat beberapa bentuk regulasi yang penting untuk ditinjau kembali dalam menghadapi MEA. Indonesia perlu melakukan antisipasi terhadap transaksi bisnis di luar negara yang berada di wilayah ASEAN yang berdampak terhadap persaingan usaha di Indonesia. Misalnya, jika terjadi transaksi bermasalah di luar negeri (negara-negara ASEAN) namun berdampak ke dalam negeri. Padahal, dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, legal standing perusahaan yang ingin melakukan gugatan harus berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pengertian pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1999 misalnya harus dapat disesuaikan dengan kepentingan pelaku usaha.

Untuk itulah diperlukan comity principle. Prinsip comity adalah prinsip penghormatan kewenangan negara asing dalam mengeksekusi kewenangannya pada perilaku usaha tertentu dalam yurisdiksinya. Demikian juga dalam hal segi-segi lainnya dari penegakan hukum seperti kerjasama eksekusi pembayaran denda atau bahkan kerjasama penegakan hukum.

Selain itu, single market dalam MEA berdampak terhadap pengertian "pasar bersangkutan", pengertian "kartel" serta dapat mengubah komposisi penguasaan pasar di negara lain dalam hal akuisisi dan merger. Lebih dari itu, sistem pengawasan persaingan usaha di masing-masing negara adalah salah satu elemen yang sangat menentukan. Sebab, materi hukum serta sistem penegakan yang berbeda-beda diantara negara ASEAN akan berakibat terhadap sistem pengawasan praktik monopoli. Dalam hal ini peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat dalam rangka menegakkan hukum persaingan sekaligus melindungi pelaku usaha Indonesia dari praktik monopoli negara lain.

Bagi penulis, dalam melindungi pelaku usaha dalam negeri, maka KPPU harus berada dalam satu bagian strategi pemerintah dalam menghadapi MEA. Program pemerintah terutama terkait ekonomi harus berada dalam "satu tarikan nafas" dengan KPPU sehingga sistem dan penegakan hukum persaingan bersinergi dengan kebijakan persaingan. Selain itu, KPPU diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memenangkan persaingan. Sampai di sini, prinsip kedaulatan ekonomi tidak dapat dinafikan dalam menghadapi MEA. Negara harus melakukan segala upaya untuk melakukan kedaulatan ekonomi. Karena itu, kedaulatan ekonomi dalam bidang persaingan harus dimasukkan dalam amandemen UU No. 5 Tahun 1999 yang telah masuk Prolegnas tahun ini.

Selain itu, peran kebijakan persaingan usaha (competition policy) mudah dipertukan untuk menciptakan iklim usahayang kondusif dan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Indonesia seyogyanya memperkuat dan memperkokoh konektivitas antar wilayah.

Sebagai negara besar dengan kepulauan yang beribu, maka konektivitas antar wilayah mutlak dilakukan untuk menjaga kepentingan bangsa. Sebab, tanpa konektivitas antar wilayah maka, Indonesia hanya berperan sebagai pasar bagi negara ASEAN yang lain. Dalam sebuah produk misalnya, orang yang berada di pulau Sumatera lebih mudah memperoleh produk dari Singapura dan Malaysia. Transportasi yang murah berdampak terhadap harga barang yang murah. Dalam hal jasa kesehatan misalnya, saat ini orang Medan lebih memilih rumah sakit di Penang Malaysia dari Rumah Sakit di Jakarta misalnya.

Penutup

Kondisi objektif kesiapan hukum persaingan usaha dalam menghadapi keberlakuan MEA perlu diperkuat dengan penguatan hukum material dan hukum formal persaingan usaha. Selain itu, hukum persaingan usaha seyogyanya sejalan dengan kebijakan persaingan usaha dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi bangsa dengan memperkuat konektivitas wilayah dan sejumlah kebijakan lainnya yang mendukung daya saing Indonesia.

Penulis adalah Pengajar Dan Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ekonomi (PUISAKE) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirin ke alamat redaksi dengan tujuan 'Redaktur Opini Waspada' dengan disertai CD atau email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata dan kartu pengenal (KTP) penulis. Naskah yang dikirim adalah karya orisinal, belum/tidak diterbitkan di media manapun. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

SUDUT BATUAH

* Golkar telah demi Pilkada serentak - Dengan kata lain demi kepentingan bersama

* Aset Bank Sumut jadi Rp23 triliun - Makin tebal kaciip, he...he...he

* Beras plastik, DPRD imbau boikot produk China - Makanya cintailah produk lokal

Opak 2001